



**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA**

TAHUN ANGGARAN 2005



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Walikota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 Desember 2004, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); f

- 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
- 19 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
Dan
WAIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2005. ♪

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Kota Salatiga sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp. 179.169.715.000,-
2. Belanja		Rp. 193.732.242.000,-
	Defisit	<u>(Rp. 14.562.527.000,-)</u>
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp. 16.226.637.000,-	
b. Pengeluaran	Rp. 1.664.110.000,-	
	Jumlah pembiayaan	<u>Rp. 14.562.527.000,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ✓

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 23 Februari 2005



Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 23 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA





LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 29

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2005**

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
I	PENDAPATAN	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	24,146,324,000
	Pajak Daerah	4,973,500,000
	Retribusi Daerah	15,484,224,000
	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan	1,911,000,000
	Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1,777,600,000
1.2	Dana Perimbangan	150,038,891,000
	Bagi Hasil Pajak	9,484,683,000
	Bagi Hasil Bukan Pajak	600,000,000
	Dana Alokasi Umum	124,117,000,000
	Dana Alokasi Khusus	7,060,000,000
	Bagi Hasil Pajak Propinsi	7,901,172,000
	Bantuan Keuangan dari Propinsi	876,036,000
1.3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	4,984,500,000
	Jumlah Pendapatan	179,169,715,000
II	BELANJA	
2.1	APARATUR DAERAH	81,837,481,000
	Belanja Administrasi Umum	72,733,360,000
	Belanja Pegawai/ Personalia	58,954,620,000
	Belanja Barang dan Jasa	10,839,215,000
	Belanja Perjalanan Dinas	1,175,697,000
	Belanja Pemeliharaan	1,763,828,000
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	4,396,554,000
	Belanja Pegawai/ Personalia	1,174,241,000
	Belanja Barang dan Jasa	2,398,278,000
	Belanja Perjalanan Dinas	813,735,000
	Belanja Pemeliharaan	10,300,000
	Belanja Modal	4,707,567,000
2.2	PELAYANAN PUBLIK	111,894,761,000
	Belanja Administrasi Umum	67,535,328,000
	Belanja Pegawai/ Personalia	54,276,163,000
	Belanja Barang dan Jasa	12,415,466,000
	Belanja Perjalanan Dinas	12,110,000
	Belanja Pemeliharaan	831,589,000
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	4,342,104,000
	Belanja Pegawai/ Personalia	555,632,000
	Belanja Barang dan Jasa	2,686,112,000
	Belanja Perjalanan Dinas	200,360,000
	Belanja Pemeliharaan	900,000,000
	Belanja Modal	29,086,822,000
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	9,723,611,000
2.4	Belanja Tidak Tersangka	1,206,896,000
	Jumlah Belanja	193,732,242,000
	Defisit	(14,562,527,000)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
III	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Daerah	16,226,637,000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	3,528,000,000
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan	12,604,637,000
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-
3.1.5	Penerimaan Piutang	94,000,000
3.1.6.	Sisa Belanja Tahun lalu	
3.2	Pengeluaran Daerah	1,664,110,000
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	
3.2.2	Penyertaan Modal	1,234,000,000
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	44,110,000
3.2.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	
3.2.5.	Pinjaman kepada Pihak ketiga	386,000,000
	Jumlah Pembiayaan	14,562,527,000



WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

DAFTAR REKAPITULASI APBD BERDASARKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2005

Kode Bekerja	Uraian Bidang dan Unit Kerja	Pendapatan	Belanja Aparatur	Belanja Pustaka	Jumlah Belanja	Surplus (Defisit)	Pembayaran Penanaman	Pembayaran Pengeluaran	Jumlah Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7 = 3 - 6	8	9	10 = 8 - 9
01	BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN	163.904.961.000	42.208.217.000	10.670.578.000	53.880.195.000	110.024.766.000	16.226.837.000	1.864.110.000	14.362.727.000
01-01	OPIC	-	1.421.804.000	-	1.421.804.000	(1.421.804.000)	-	-	-
01-02	Sekretariat (SPS)	-	2.803.987.000	20.000.000	3.073.987.000	(2.873.987.000)	-	-	-
01-03	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	990.850.000	-	990.850.000	(990.850.000)	-	-	-
01-04	Sekretariat Daerah	230.500.000	10.189.522.000	4.591.896.000	18.791.390.000	(18.530.888.000)	-	-	-
01-05	Badan Penanaman Daerah	-	1.806.243.000	139.500.000	2.045.743.000	(2.045.743.000)	-	-	-
01-06	Badan Pengantar Daerah	-	1.629.575.000	-	1.629.575.000	(1.629.575.000)	-	-	-
01-07	Daerah Penyelidikan Keuangan Daerah	163.890.491.000	2.008.261.000	225.470.000	3.320.671.000	(3.156.820.000)	16.226.837.000	1.864.110.000	14.362.727.000
01-08	Badan Kelengkapan Daerah	-	7.514.563.000	-	7.514.563.000	(7.514.563.000)	-	-	-
01-09	Kantor Pengkajian Data Elektronik, Arsip dan Perjustakan Daerah	-	1.458.649.000	40.000.000	1.508.649.000	(1.508.649.000)	-	-	-
01-10	Kantor Informasi dan Komunikasi	70.300.000	577.737.000	237.784.000	815.501.000	(745.201.000)	-	-	-
01-11	Kantor Satgas PP	4.000.000	1.496.353.000	100.351.000	1.696.904.000	(1.692.904.000)	-	-	-
01-12	Kantor Kesatuan Bangsa dan Pertahanan Masyarakat	-	862.470.000	521.867.000	1.404.337.000	(1.404.337.000)	-	-	-
01-13	Kecamatan Sabuntu	-	1.692.881.000	495.000.000	2.177.881.000	(2.177.881.000)	-	-	-
01-14	Kecamatan Sekeloa	-	2.547.203.000	733.000.000	3.280.203.000	(3.280.203.000)	-	-	-
01-15	Kecamatan Tegal	-	2.305.571.000	733.000.000	3.038.571.000	(3.038.571.000)	-	-	-
01-16	Kecamatan Agamuljo	-	1.896.876.000	733.000.000	2.729.876.000	(2.729.876.000)	-	-	-
02	BIDANG PERTANIAN	160.480.000	3.390.478.000	54.611.000	3.985.089.000	(3.824.609.000)	-	-	-
02-01	Daerah Pertanian	160.480.000	3.390.478.000	54.611.000	3.985.089.000	(3.824.609.000)	-	-	-
06	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.239.982.000	3.470.811.000	273.511.000	3.883.822.000	(2.643.840.000)	-	-	-
06-01	Daerah Perindustrian dan Perdagangan	39.570.000	1.148.096.000	144.511.000	1.292.577.000	(1.253.007.000)	-	-	-
06-02	Daerah Pasar dan Pedagang Kaki Lima	1.200.412.000	2.322.715.000	128.999.000	2.290.915.000	(1.090.503.000)	-	-	-
07	BIDANG PERKOPERASIAN	94.000.000	817.122.000	75.000.000	892.122.000	(798.122.000)	-	-	-
07-01	Daerah Pokok dan Usaha Kecil Menengah	94.000.000	817.122.000	75.000.000	892.122.000	(798.122.000)	-	-	-
08	BIDANG PENANAMAN MODAL	-	1.311.862.000	-	1.311.862.000	(1.311.862.000)	-	-	-
08-01	Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah	-	1.311.862.000	-	1.311.862.000	(1.311.862.000)	-	-	-
09	BIDANG KETENAGAKERJAAN	10.000.000	1.848.433.000	854.303.000	2.802.736.000	(2.792.736.000)	-	-	-
09-01	Daerah Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat	10.000.000	1.848.433.000	854.303.000	2.802.736.000	(2.792.736.000)	-	-	-
10	BIDANG KESEHATAN	11.225.728.000	12.254.822.000	23.807.884.000	36.162.418.000	(24.936.690.000)	-	-	-
10-01	Daerah Kesehatan	506.787.000	4.364.956.000	2.786.358.000	8.158.101.000	(8.651.314.000)	-	-	-
10-02	Badan Pengelola RSUD	11.188.482.000	5.890.296.000	18.854.230.000	25.514.501.000	(14.326.019.000)	-	-	-
10-03	BP4	234.480.000	-	1.487.000.000	1.487.000.000	(1.252.520.000)	-	-	-

Kode Bekering	Urutan Bidang dan Unit Kerja	Pendapatan	Belanja Aparatur	Belanja Publik	Jumlah Belanja	Surplus (Defisit)	Pembayaran Penerimaan	Pembayaran Pengeluaran	Jumlah Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7 = 3 - 6	8	9	10 = 8 - 9
11	BIDANG PENDIDIKAN	-	4.915.183.000	56.715.308.000	61.632.121.000	(61.632.121.000)	-	-	-
11.01	Dinas Pendidikan	-	4.479.696.000	35.396.468.000	39.896.186.000	(39.896.186.000)	-	-	-
11.02	SMP Negeri 1	-	-	1.494.467.000	1.494.467.000	(1.494.467.000)	-	-	-
11.03	SMP Negeri 2	-	-	1.417.210.000	1.417.210.000	(1.417.210.000)	-	-	-
11.04	SMP Negeri 3	-	-	1.451.927.000	1.451.927.000	(1.451.927.000)	-	-	-
11.05	SMP Negeri 4	-	-	1.134.760.000	1.134.760.000	(1.134.760.000)	-	-	-
11.06	SMP Negeri 5	-	-	1.195.261.000	1.195.261.000	(1.195.261.000)	-	-	-
11.07	SMP Negeri 6	-	-	1.273.029.000	1.273.029.000	(1.273.029.000)	-	-	-
11.08	SMP Negeri 7	-	-	1.018.440.000	1.018.440.000	(1.018.440.000)	-	-	-
11.09	SMP Negeri 8	-	-	967.294.000	967.294.000	(967.294.000)	-	-	-
11.10	SMP Negeri 9	-	-	967.103.000	967.103.000	(967.103.000)	-	-	-
11.11	SMP Negeri 10	-	-	896.906.000	896.906.000	(896.906.000)	-	-	-
11.12	SMA Negeri 1	-	-	2.182.947.000	2.182.947.000	(2.182.947.000)	-	-	-
11.13	SMA Negeri 2	-	-	2.059.052.000	2.059.052.000	(2.059.052.000)	-	-	-
11.14	SMA Negeri 3	-	-	1.819.587.000	1.819.587.000	(1.819.587.000)	-	-	-
11.15	SMK Negeri 1	-	-	1.886.813.000	1.886.813.000	(1.886.813.000)	-	-	-
11.16	SMK Negeri 2	-	-	1.801.640.000	1.801.640.000	(1.801.640.000)	-	-	-
11.17	SAB	-	400.485.000	90.202.000	525.687.000	(525.687.000)	-	-	-
12	BIDANG SOSIAL	-	1.808.835.000	283.475.000	1.892.310.000	(1.892.310.000)	-	-	-
12.01	Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana	-	1.808.835.000	283.475.000	1.892.310.000	(1.892.310.000)	-	-	-
13	BIDANG PEKERJAAN UMUM	423.000.000	4.203.302.000	7.194.869.000	12.086.171.000	(11.675.171.000)	-	-	-
13.01	Dinas Pekerjaan Umum	423.000.000	4.203.302.000	7.194.869.000	12.086.171.000	(11.675.171.000)	-	-	-
14	BIDANG PERHUBUNGAN	836.213.000	2.381.756.000	216.087.000	2.887.855.000	(2.087.642.000)	-	-	-
14.01	Dinas Perhubungan	836.213.000	2.381.756.000	216.087.000	2.887.855.000	(2.087.642.000)	-	-	-
17	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	442.120.000	1.795.707.000	10.585.462.000	12.347.158.000	(11.899.038.000)	-	-	-
17.01	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	442.120.000	1.795.707.000	10.585.462.000	12.347.158.000	(11.899.038.000)	-	-	-
18	BIDANG KEPENDUKUKAN	275.600.000	1.824.884.000	94.753.000	1.195.437.000	(843.837.000)	-	-	-
18.01	Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	275.600.000	1.824.884.000	94.753.000	1.195.437.000	(843.837.000)	-	-	-
20	BIDANG KEPARAHASIAAN	60.000.000	795.267.000	497.680.000	1.292.947.000	(1.192.947.000)	-	-	-
20.01	Dinas Pariwisata, Seni dan Olahraga	60.000.000	795.267.000	497.680.000	1.292.947.000	(1.192.947.000)	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	179.169.715.000	81.837.481.000	111.894.761.000	193.732.240.000	(14.962.527.000)	16.228.637.000	1.664.110.000	14.562.527.000



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH

NOMOR : 1 Tahun 2005

TANGGAL : 23 Februari 2005

PEMERINTAH DAERAH KOTA SALATIGA
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 KEADAAN S/D 31 JULI 2004

GOLONGAN	ESELON						STAFF	TOTAL
	II		III		IV			
	A	B	A	B	A	B		
Golongan IV/e							3	0
Golongan IV/d							6	3
Golongan IV/c		2					11	8
Golongan IV/b	1	13	3		1	1	404	30
Golongan IV/a		2	62		4		404	472
JUMLAH GOLONGAN IV	1	17	65	0	5	1	424	513
Golongan III/d			5	3	66		399	473
Golongan III/c				1	184	8	408	601
Golongan III/b					22	68	479	569
Golongan III/a						34	521	555
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	5	4	272	110	521	2198
Golongan II/d							240	240
Golongan II/c							254	254
Golongan II/b							151	151
Golongan II/a							285	285
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	0	930	930
Golongan I/d							43	43
Golongan I/c							34	34
Golongan I/b							0	0
Golongan I/a							5	5
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	82	82
TOTAL	1	17	70	4	277	111	1957	3723



LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 1 Tahun 2005
 TANGGAL : 23 Februari 2005

PEMERINTAH DAERAH KOTA SALATIGA
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2004

No	Jenis Piutang/Debitur	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak	84.062.375	109.414.017	84.062.375	109.414.017	
	a. Pajak Restoran & Warung Makan	49.951.000	49.951.000	49.951.000	49.951.000	
	b. Pajak Reklame	3.885.625	31.009.517	3.885.625	31.009.517	
	c. Pajak Hiburan	6.555.750	14.351.000	6.555.750	14.351.000	
	d. Pajak Pemondokan	23.670.000	14.102.500	23.670.000	14.102.500	
2	Piutang Restitusi Pajak	895.863.143	-	895.863.143	-	
	(PPH Ps. 21)	895.863.143	-	895.863.143	-	
3	Piutang Pada Dinas/ Satuan Kerja	980.760.750	643.000.000	253.000.000	1.370.760.750	
	a. Dinas Pertanian	31.020.750	18.000.000	-	49.020.750	
	b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	240.000.000	150.000.000	-	390.000.000	
	c. Dinas Koperasi dan UKM	550.740.000	475.000.000	94.000.000	931.740.000	
	d. Bagian Perekonomian	159.000.000	-	159.000.000	-	



LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH

NOMOR : 1 Tahun 2005

TANGGAL : 23 Februari 2005

KABUPATEN SALATIGA
JANUARI 2005

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	108,663,900	106,993,890	108,663,900	106,993,890	
Hutang Kepada Pemerintah Pusat	507,254,259	-	44,109,066	106,993,890	
JUMLAH	615,918,160	106,993,890	152,772,975	213,987,780	

WALIKOTA SALATIGA, 5

H. TOTOK MINTARTO 8



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 1 Tahun 2005
 TANGGAL : 23 Februari 2005

DAFTAR INVESTASI DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2004

No	Jenis Investasi	Tahun Pertama Investasi	Nama Perusahaan/ Lembaga	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyertaan Miskal	1997	BKK	440.892.000			440.892.000	
		1998	EPR	600.000.000	250.000.000		850.000.000	
		1999	PDAM	9.405.851.000	2.000.000.000		11.405.851.000	
		2000	SPBU	2.331.091.000	429.684.000		2.760.775.000	
			BPD	898.000.000			898.000.000	
		1997	PT PRPP	572.605.000	100.000.000		672.605.000	
	JUMLAH			14.218.439.000	2.779.684.000		16.998.123.000	



**DAFTAR RINGKASAN NILAI AKTIVA TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2004**

No	Uraian	Saldo per 31-12-2003	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31-12-2004	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	375,147,108,000	837,213,750	-	375,984,321,750	
2	Bangunan dan Gedung	168,160,371,249	12,031,012,679	-	180,191,383,928	
3	Peralatan dan Mesin	39,350,207,343	1,286,647,200	-	40,636,854,543	
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	90,714,124,261	9,204,779,090	-	99,918,903,351	
5	Aktiva tetap lainnya	5,221,628,216	15,255,999,894	-	20,477,628,110	
6	Konstruksi dalam pengerjaan	649,440,000	(649,440,000)	-	-	
	Jumlah Total	679,242,879,069	37,966,212,613	-	717,209,091,682	



DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2004

No.	Tahun mulai membentuk Dana Cadangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1	2003	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000	
	JUMLAH	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000	

